



Strategi Reintegrasi Sosial UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur dalam Mengatasi PMI Deportasi dari Malaysia

Chelsa Aulia F.^{1*}, Wahidah Zein Br. Siregar²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: chelsaulia@gmail.com¹, wahidahsiregar@uinsa.ac.id²

*Penulis Korespondensi: chelsaulia@gmail.com

Abstract: Working abroad has become a choice for many residents of East Java to improve their families' economic conditions, with Malaysia as the main destination. However, the phenomenon of deportation particularly through non-procedural channels gives rise to complex issues ranging from economic hardship and psychological trauma to negative stigma in their communities of origin, which can hinder social reintegration. This study aims to examine the social reintegration strategies implemented by the UPT P2TK of the East Java Provincial Department of Manpower and Transmigration for deported Indonesian migrant workers (PMI) from Malaysia, as well as to identify the barriers and effectiveness of these interventions. The research method employed is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with informants at the UPT P2TK from February to April 2026. The findings indicate that the UPT P2TK has implemented reintegration strategies through stages of stabilization at shelters, repatriation assistance to their home regions using a Minutes of Handover, and economic empowerment programs in the form of skills training. However, the success of reintegration heavily depends on acceptance by the family and the social environment to mitigate the stigma of "failure." The main obstacles identified include budget constraints for post-program monitoring and inaccurate address data for migrant workers. The implications of this study emphasize that reintegration strategies should not be limited to the administrative aspects of repatriation alone, but require strengthened cross-sectoral collaboration and adequate budgetary support for ongoing monitoring. This is crucial to ensuring the economic self-reliance of migrant workers in their home country and preventing them from returning to illegal migration due to social and economic pressures.

Keywords: Deported Migrant Workers; Economic Empowerment; Social Reintegration; Social Stigma; UPT P2TK.

Abstrak: Bekerja di luar negeri menjadi sebuah pilihan bagi banyak warga Jawa Timur untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, dengan menjadikan negara Malaysia sebagai tujuan utama. Namun, fenomena deportasi, khususnya dari jalur non-prosedural, menimbulkan masalah kompleks yang mencakup kegagalan ekonomi, trauma psikis, hingga stigma negatif di lingkungan asal yang dapat menghambat reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari strategi reintegrasi sosial yang dilakukan oleh UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna deportasi asal Malaysia, serta mengidentifikasi hambatan dan efektivitas intervensi tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan narasumber di UPT P2TK pada periode Februari hingga April 2026. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK telah menjalankan strategi reintegrasi melalui tahapan stabilisasi di *shelter*, bantuan pemulangan hingga ke daerah asal dengan Berita Acara Serah Terima, serta program pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan keterampilan. Meski demikian, keberhasilan reintegrasi sangat bergantung pada penerimaan keluarga dan lingkungan sosial guna memitigasi stigma "gagal". Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran untuk monitoring pasca-program dan data alamat PMI yang tidak akurat. Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa strategi reintegrasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif pemulangan semata, melainkan memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor dan dukungan anggaran yang memadai untuk pemantauan berkelanjutan. Hal ini krusial untuk memastikan kemandirian ekonomi PMI di tanah air dan mencegah mereka kembali ke jalur migrasi ilegal akibat tekanan sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: PMI Deportasi; Pemberdayaan Ekonomi; Reintegrasi Sosial; Stigma Sosial; UPT P2TK.

1. LATAR BELAKANG

Bekerja di luar negeri merupakan sebuah keputusan yang besar oleh sebagian warga negara Indonesia untuk mendapatkan gaji yang lebih besar demi mengatasi keterbatasan perekonomian keluarga di dalam negeri. Malaysia merupakan negara dengan konsentrasi pekerja migran Indonesia terbesar di seluruh dunia (Kemenko, 2025). Menurut data statistik, dari Provinsi Jawa Timur sebelumnya jumlah warga bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia pada tahun 2025 sebanyak 1.809 orang, sedangkan di tahun 2026 saat ini terpantau 684 orang (KP2MI, 2026). Secara umum berdasarkan mekanisme keberangkatan PMI terbagi menjadi dua kategori. Pertama, PMI yang diberangkatkan secara legal memenuhi syarat dan ketentuan dari pemerintah Indonesia, sedangkan yang kedua PMI yang diberangkatkan secara ilegal karena tidak memenuhi ketentuan prosedural yang legal dan tidak memiliki dokumen resmi yang sah. Deportasi Pekerja Migran Indonesia ditemukan yang paling banyak dari negara Malaysia yang seringkali menjadi persoalan yang tidak hanya berhenti para proses kepulangan semata (Hakim & Si, 2025). PMI yang pulang melalui jalur deportasi, seringkali menghadapi tantangan berupa stigmatisasi yang mengandung unsur negatif di lingkungan asal mereka. Masyarakat memandang bahwa deportasi disamakan dengan kegagalan secara ekonomi atau sebuah konsekuensi dari tindakan kriminal dan status ilegal, yang berakibat menjadi penghambat reintegrasi sosial mereka.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) memiliki peran penting di dalam para PMI yang menghadapi berbagai permasalahan akibat deportasi ini. UPT P2TK merupakan salah satu Lembaga kunci di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan langsung kepada calon PMI. Adapun fungsi dari UPT P2TK yaitu verifikasi dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan, pendampingan, dan pengurusan masalah kepulangan ke tanah air PMI. UPT P2TK ditugaskan untuk menangani berbagai masalah dari pekerja migran seperti, advokasi, mediasi, dan pemulangan (Siswanto Dimas Gerald, Pramesti Anggita, Shofil Charis Muhammad, 2025).

Reintegrasi sosial merupakan proses kembalinya individu ke lingkup masyarakat setelah mereka mengalami situasi dimana mereka terpinggirkan atau terasingkan. Situasi ini dapat mencakup masa hukuman di lingkup masyarakat. Dalam proses reintegrasi sosial biasanya melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak seperti, organisasi non pemerintah, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Proses reintegrasi ini sering mengalami tantangan, salah satu tantangan dengan nya adalah stigma dari masyarakat terkait individu. Adanya stigma ini dapat menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan, diterima kembali oleh masyarakat,

atau bahkan tidak mendapat dukungan dari keluarga. Selain stigma sosial, proses reintegrasi ini juga mengalami tantangan hal lain seperti, kurangnya sumber daya, baik berupa anggaran maupun tenaga pendukung yang seringkali membuat proses reintegrasi ini kurang berjalan secara optimal (Fitria et al., 2025).

Kajian sebelumnya menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Disnakertrans Jawa Timur memiliki sebuah mandat yaitu dalam hal melindungi hak – hak pekerja migran Indonesia (PMI). Peran UPT P2TK tidak hanya melindungi para PMI yang legal, tetapi juga berperan dalam menangani kasus PMI, misalnya di tahun 2022 Disnakertrans melalui UPT P2TK menangani PMI bermasalah yang deportasi dari Malaysia sejumlah 50 orang. Sebagai contoh kasus yang lain, setelah diketahui akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia, sebanyak 87 calon PMI, mayoritas adalah perempuan, kemudian mereka akan dibawa ke shelter UPT P2TK di Surabaya. Hal ini menunjukkan peran UPT P2TK dalam mencegah keberangkatan yang tidak sesuai prosedur, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak ekonomi dan eksploitasi (Annafiurrahman, 2025).

Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa UPT P2TK memainkan peran penting dalam membantu repatriasi (pemulangan) PMI yang dideportasi, khususnya dari Malaysia. Dalam operasinya, UPT P2TK berfungsi sebagai titik koordinasi utama dan menjemput PMI di titik kedatangan mereka, dengan melakukan pendataan ulang, dan menyediakan tempat tinggal sementara di shelter sebelum mereka dipulangkan ke daerah asal mereka. Pada layanan ini sangat penting karena PMI yang dideportasi sering berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan mental sebagai hasil dari pengalaman traumatis atau pelanggaran hak di negara tujuan. Selain aspek administratif, lembaga ini juga ditemukan memiliki peran strategis dalam memulai inisiatif awal pemberdayaan purna penempatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah PMI kembali terjatuh dalam jalur migrasi ilegal (Aprilliana & Gunawan, 2025).

Jurnal pertama berfokus pada efektivitas layanan fasilitasi repatriasi di bandara hingga ke shelter UPT P2TK, letak kebaruan pada penelitian ini hanya fokus pada tahap pasca pemulangan yaitu reintegrasi sosial yaitu bagaimana strategi yang dijalankan oleh UPT P2TK dalam hal mengembalikan para PMI yang di deportasi untuk kembali ke masyarakat. Jurnal kedua memiliki inti pada aspek pelanggaran hak gaji dan keamanan ekonomi dalam kerangka *Human Security* yang berkolaborasi diplomatik dengan kemenlu. Dari penelitian sebelumnya terdapat celah kebaruan dari penelitian ini yaitu memandang dari segi sosiologis yang memandang bagaimana peran UPT P2TK dalam menangani PMI yang mengalami trauma dari permasalahan deportasi dari negara Malaysia, untuk menjalani proses reintegrasi sosial agar tidak kembali menjadi PMI yang melalui jalur non prosedural.

Penelitian ini penting dilakukan karena urgensinya terletak pada penanganan permasalahan PMI terkait kegagalan ekonomi dan trauma akibat stigma negatif masyarakat. Jika UPT P2TK hanya berfokus pada proses pemulangan saja tanpa adanya strategi reintegrasi sosial yang kuat, maka PMI cenderung akan kembali bekerja ke luar negeri dengan jalur non prosedural. Tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk mempelajari mekanisme dalam hal strategi reintegrasi sosial yang dilakukan oleh UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur untuk para PMI yang di deportasi dari Malaysia. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pegawai UPT P2TK seperti stigma dari masyarakat terkait pemulangan PMI deportasi yang dapat menghambat pemulihan para PMI. Selain itu, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif intervensi kelembagaan dapat memberikan pemulihan dan membantu para PMI untuk kembali ke lingkungan sosialnya dengan cara yang produktif, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Reintegrasi sosial merujuk pada sebuah proses penyesuaian kembali para Pekerja Migran ke dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat setelah terjadinya pengembalian paksa atau yang disebut deportasi (Black & Gent, 2006). Reintegrasi sosial adalah upaya untuk mengatasi masalah seperti pengangguran, trauma psikologis, disintegrasi keluarga, dan stigma dari masyarakat dalam konteks pekerja migran yang di deportasi dari Malaysia. Untuk mencapai reintegrasi yang berkelanjutan diperlukan strategi yang melibatkan lembaga pemerintahan seperti UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur (Publication, n.d.).

Dalam buku *Sustainable Return: The Political Economy Of International Migration*, Black dan Gent menyatakan bahwa reintegrasi sosial melalui empat dimensi utama. Dimensi ekonomi, berupa pemulihan mata pencaharian melalui keterampilan dan akses modal usaha, bahwa ketidakmampuan ekonomi sering menjadi hambatan utama reintegrasi. Dimensi sosial, rekonstruksi jaringan keluarga dan komunitas untuk mengurangi isolasi sosial, teori ini menyatakan bahwa pendampingan komunitas dapat mengatasi stigma deportasi. Dimensi psikologis, sebuah penanganan trauma dan kehilangan identitas melalui program konseling. Dimensi kultural, meliputi adaptasi nilai dan norma lokal pasca pengalaman migrasi lintas budaya (Black & Gent, 2006). Teori tersebut relevan dengan penelitian ini karena dari beberapa dimensi tersebut dapat dijadikan bahan untuk analisis strategi UPT P2TK Disnakertrans Jawa timur, seperti adanya program pelatihan kerja, konseling, dan forum silaturahmi.

Teori reintegrasi sosial dari Black & Gent sejalan dengan teori dari Durkheim dalam bukunya yang berjudul *“The Division Of Labor In Society”* tentang teori struktural – fungsional terkait kohesi sosial yang melibatkan solidaritas. Durkheim membagi solidaritas menjadi 2, pertama yaitu solidaritas mekanik, terwujudkan melalui integrasi berdasarkan persamaan nilai/norma yang terjadi pada masyarakat tradisional. Kedua yaitu solidaritas organik, terjadinya integrasi pada masyarakat modern dengan adanya ketergantungan antar individu akibat pembagian kerja. (Durkheim, 1893).

Kedua teori tersebut memiliki persamaan paradigma yang relevan untuk strategi reintegrasi sosial oleh UPT P2TK. Persamaan yang pertama yaitu dalam hal integrasi, keduanya menekankan pemulihan kohesi sosial pasca krisis yang merujuk pada “Deportasi” yang dianggap sebagai krisis seperti anomie/ trauma secara individu setelah terjadinya deportasi PMI. Kesamaan dalam hal peran institusi, yang dimana Durkheim menggunakan tindakan hukum/ moral sedangkan dari Black melalui program Pemerintah, yang melibatkan instansi UPT P2TK sebagai pengendali solidaritas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evania Fidyawati, Mulia Ardi (2024) menunjukkan bahwa teori struktural fungsional dari Durkheim relevan untuk menjelaskan peran dari keluarga PMI yang dapat dilihat secara struktural, yang dimana keluarga memiliki peran yang penting untuk menjaga stabilitas sosial dan kelangsungan pada sistem sosial. Menurut pandangan struktural fungsional, masalah yang muncul sebagai akibat dari ketidakstabilan dalam PMI dapat berdampak pada stabilitas keluarga, kesejahteraan keluarga, dan fungsi sosial keluarga. Dalam hal ini, solidaritas organik berarti komunitas yang saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain (Fidyawati & Ardi, 2024). Hal tersebut berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana lingkungan sekitar terutama orang terdekat seperti keluarga para PMI, peran mereka sangat dibutuhkan ketika PMI yang dipulangkan secara paksa di negara asal atau yang disebut Deportasi, tidak sedikit orang sekitarnya yang tidak mau menerima kembali para PMI yang terkena deportasi tersebut.

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan oleh Judith Janker, Susan Thieme pada tahun 2021, yang menyatakan dari teori Black & Gent mengenai *Sustainable return* atau pemulangan yang berkelanjutan. Kerangka kerja Black & Gent menilai pengaruh migrasi yang kembali pada berbagai aktor masyarakat, yang dimana memahami aspek – aspek yang memengaruhi kualitas proses migrasi (Janker & Thieme, 2021). Hal ini juga dapat dilihat dari tujuan para PMI yang memutuskan untuk melakukan migrasi terkait faktor ekonomi maupun dari faktor sosial. Tidak hanya itu, dengan adanya PMI yang dideportasi, kembali lagi pada masyarakat sekitarnya ataupun keluarganya terkait stigma yang beredar penyebab mereka di

deportasi. Dengan munculnya permasalahan yang dihadapi oleh PMI tersebut menunjukkan bahwa aktor masyarakat ini dapat memengaruhi para PMI dalam hal proses keputusan untuk melakukan migrasi selanjutnya.

Teori Black & Gent menjelaskan kerangka berpikir yang praktis mengenai tahapan dan dimensi teknis yang dibutuhkan dalam proses keputusan migran. Sementara itu teori Durkheim, memberikan landasan secara sosiologis tentang mengapa proses tersebut penting bagi stabilitas masyarakat sekitar melalui konsep solidaritas. Deportasi bukan hanya diartikan sebagai keputusan paksa secara fisik, tetapi didalamnya juga mengandung unsur “trauma atau krisis” bagi para deportan, yang memerlukan pendampingan dan penanganan oleh instansi yaitu upaya dari pihak UPT P2TK untuk mencegah terjadinya disintegrasi sosial di tingkat lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan interaksi sosial manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lokasi penelitian dilakukan di UPT-P2TK Disnakertrans Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara narasumber pegawai UPT P2TK di bidang Perleva. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dari berbagai sumber yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikannya ke dalam suatu kategori (Reduksi), uraian dasar (Penyajian data), dan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data pada penelitian ini dengan cara membandingkan Informasi atau data dengan cara yang berbeda atau yang disebut triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang telah dilakukan di instansi UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur pada periode Februari hingga April 2026 menunjukkan bahwa mayoritas kasus deportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berasal dari Malaysia, yakni mencapai 80%. Berdasarkan data lapangan, tingginya angka deportasi tersebut didominasi oleh PMI yang berangkat melalui jalur non-prosedural.

Tabel 1. Data Jumlah PMI Deportasi dari Negara Malaysia.

Tahun	Jumlah
2020	2
2021	2
2022	1
2024	59
2025	198

Sumber: (KP2MI, 2026).

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia mencapai angka tertinggi. Meskipun demikian, data tersebut terpantau belum mencakup seluruh statistik kepulangan para PMI yang pulang disebabkan oleh deportasi. Menurut data dari UPT P2TK, jumlah PMI yang terkena deportasi dari negara Malaysia di tahun 2025 mencapai sebesar 435 orang dikarenakan kasus dan 54 orang berada di shelter, sehingga total keseluruhan ada 489 orang. Selain dikarenakan masalah status keimigrasian, terdapat faktor lain yang mendominasi meliputi pelanggaran izin tinggal (visa), keterlibatan dalam kasus kriminal, kondisi kesehatan yang memburuk, hingga tindakan melarikan diri dari pemberi kerja.

Kepulangan para PMI ini tidak jarang menyisakan persoalan yang sedikit, banyak di antara mereka kembali dalam kondisi fisik maupun psikis yang tidak stabil. Menanggapi situasi tersebut, peran UPT P2TK menjadi sangat krusial dalam memberikan pendampingan selama proses pemulangan ke daerah asal. Upaya reintegrasi sosial diperlukan guna memastikan para mantan pekerja migran ini dapat kembali beradaptasi dan menjalani kehidupan yang layak di lingkungan masyarakat asalnya (Wawancara, 6 April 2026).

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa proses reintegrasi sosial yang dilaksanakan oleh UPT P2TK telah berjalan sesuai prosedur. Dengan demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama dalam melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasca-kepulangan. Keberhasilan strategi reintegrasi ini sangat bergantung pada dukungan lingkungan sosial dan pihak keluarga. Penerimaan positif dari lingkungan sekitar terhadap PMI yang dideportasi menjadi indikator keberhasilan penuh proses reintegrasi. Sebaliknya, penolakan dari keluarga maupun masyarakat berpotensi memicu kegagalan sistemik dalam pemulihan fungsi sosial PMI tersebut.

Bentuk Strategi dan Tahapan Program Reintegrasi Sosial UPT P2TK Terhadap PMI yang di Deportasi

Berdasarkan keterangan narasumber, strategi reintegrasi sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) purnatugas maupun yang dideportasi dari Malaysia diawali dengan upaya penjaminan keberlanjutan dan pemantauan secara intensif. Proses ini dilakukan oleh UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur melalui serangkaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat di Bandara Internasional Juanda. Sebagai langkah awal pendataan, UPT P2TK menyediakan fasilitas *Help Desk* yang berfungsi sebagai pusat informasi dan verifikasi, baik bagi PMI yang pulang karena habis masa kontrak, cuti, maupun karena kendala hukum (deportasi). Khusus bagi PMI yang bermasalah, prosedur kepulangan tidak dilakukan secara

langsung. Mereka terlebih dahulu diarahkan ke fasilitas *shelter* atau rumah aman untuk proses stabilisasi guna memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka dalam keadaan layak sebelum dipulangkan ke daerah asal.

Setelah para PMI kembali di daerah asalnya, pihak UPT P2TK juga membantu mereka untuk beradaptasi kembali dan memberdayakan diri. Tahapan tersebut salah satunya yaitu dengan cara monitoring dan pendataan, pendataan PMI yang kembali untuk tujuan monitor kondisi mereka dan menentukan kebutuhan reintegrasi sosial (Siswanto Dimas Gerald, Pramesti Anggita, Shofil Charis Muhammad, 2025). Dari penelitian sebelumnya sejalan dengan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh pihak UPT P2TK yang dimana mereka melakukan monitoring terhadap PMI yang menuju ke tempat asalnya, berdasarkan penjelasan dari narasumber yang menyatakan “*Kalau untuk pemantauan kita tidak bisa memantau secara langsung Tetapi Kita mengawasinya atau monitoringnya dari Kita minta nomor HP keluarga yang ada di sana, Selain itu kita juga minta nomor driver Kalau dia naik travel, kita minta nomor driver Nomor habis drivernya Atau mungkin kalau diantar ke bis, kita minta nomor sopir bisnya Kita foto di situ*” (Wawancara, 6 April 2026). Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, keberhasilan proses pemulangan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dokumen ini berfungsi sebagai bukti yang kuat bahwa negara telah menyerahkan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada pihak keluarga atau perangkat desa dengan disaksikan oleh warga setempat. Melalui penandatanganan BAST oleh kedua belah pihak, secara teknis tanggung jawab formal UPT P2TK dinyatakan telah selesai.

Meskipun secara SOP tugas secara teknis berakhir pada tahap serah terima, UPT P2TK masih memiliki rekam jejak untuk monitoring pasca kepulangan. Namun, secara kenyataannya di lapangan seperti data alamat PMI yang tidak akurat atau subjek yang sulit untuk ditemukan hingga ke tingkat dusun. Pihak UPT melakukan kolaborasi lintas sektor untuk menangani keberlanjutan PMI deportasi dengan mengalami permasalahan seperti, gangguan kesehatan mental, atau ketidakjelasan identitas. Lembaga lintas sektor tersebut meliputi, lembaga rehabilitas sosial, Rumah Sakit Jiwa, dan Dinas Sosial. Untuk PMI yang tidak memiliki kejelasan identitas atau tidak diterima kembali oleh keluarganya maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang terlantar yang nantinya akan diserahkan ke lembaga Dinas Sosial (Wawancara, 7 April 2026). Hal ini menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan standar operasional prosedur (SOP), perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tetap dioptimalkan melalui sinergi antarlembaga. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan PMI pasca masa kerja di luar negeri.

Para pekerja migran yang kembali ke Indonesia dan berusaha untuk tetap bekerja di tanah air dan tidak berminat untuk kembali ke luar negeri dapat mencapai kesuksesan dalam sektor ekonomi baru. Banyak diantara mereka yang mencoba membuka usaha sendiri dengan hasil yang menguntungkan, namun dari mereka tidak semua tercipta dengan lancar ada yang mengalami kegagalan ataupun ada juga bisnisnya yang sukses (Maiwan, 2016). Pada penelitian sebelumnya sejalan dengan penelitian saat ini namun tidak dijelaskan secara spesifik terkait program purna PMI yang dilaksanakan oleh lembaga UPT P2TK. Berdasarkan hasil dari wawancara narasumber yang menyatakan “*Dari kami ada kegiatan terkait dengan pemberdayaan PMI purna, kegiatan itu merupakan salah satu kegiatan utama. Jadi PMI yang pulang, kita beri pelatihan tetapi pelatihan itu sifatnya hanya membantu kehidupan mereka di daerah jadi sifatnya adalah hanya sementara hanya 5 hari*”. Program pelatihan tersebut berlaku untuk semua PMI tidak memandang PMI B (bermasalah) atau tidak (Wawancara, 6 April 2026).

Program pemberdayaan untuk PMI purna berfokus pada reintegrasi ekonomi melalui tahapan pelatihan memasak seperti pembuatan kue bolen, dan lainnya dengan tujuan mengubah remitansi menjadi modal yang produktif. Pihak UPT P2TK juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengelola izin PIRT. Selain itu, juga menghadirkan sesi *Success Story* dari mantan PMI yang sukses, guna untuk memotivasi para peserta yang lain agar mereka juga mampu mandiri secara ekonomi di Indonesia untuk tidak harus kembali bekerja di luar negeri (Wawancara, 7 April 2026).

Faktor Penghambat yang Dihadapi UPT P2TK dalam Proses Reintegrasi Sosial terhadap Stigma Negatif Oleh PMI yang di Deportasi

Reintegrasi sosial yang dilaksanakan oleh UPT P2TK seringkali menghadapi dinding penghalang yang kuat, terutama ketika menghadapi sebuah penolakan dari keluarga PMI atau lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pemulangan para PMI yang terkena deportasi tergantung pada koordinasi antara administratif dengan keuangan UPT P2TK dan Disnakertrans daerah asal, serta pengalaman pribadi dan hubungan sosial yang ditinggalkan PMI sebelum berangkat ke luar negeri. Dalam berbagai kasus, keluarga inti justru menunjukkan keengganan untuk menerima kembali kepulangan PMI, meski seluruh biaya pemulangan telah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Menghadapi dinamika tersebut, UPT P2TK menginisiasi berbagai strategi alternatif guna memastikan PMI dapat diterima kembali dan berintegrasi secara harmonis di lingkungan asalnya, sebagaimana pernyataan dari narasumber “*Lalu jika PMI tersebut tetap tidak ada yang*

mau menerimanya kembali di keluarganya, maka pihak Disnakertrans daerah tetap memulangkan PMI tersebut jika ia masih memiliki saudara yang memang mau menerimanya kembali, baik itu saudara dekat ataupun jauh” (Wawancara, 6 April 2026).

Dalam perspektif sosiologi keluarga, bahwa keluarga merupakan sebuah proses dinamis yang dibentuk oleh negoisasi peran, relasi gender, dan strategi ekonomi sehari – hari. Ketahanan sebuah keluarga pada PMI yang telah kembali dari migrasi, menjadi lebih sulit karena peran domestik dan hubungan emosional yang terganggu selama periode migrasi (Pujiati Sri, 2025). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran keluarga sangat krusial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna, khususnya mereka yang dipulangkan melalui proses deportasi dan membutuhkan dukungan psikososial lebih intensif. Namun, proses reintegrasi sosial yang dijalankan oleh UPT P2TK seringkali terhambat oleh resistensi dari pihak keluarga maupun masyarakat yang enggan menerima kembali kepulangan PMI deportasi tersebut. Sebagaimana pernyataan dari narasumber *“Jelas ada keluarga yang ditinggalkan, dengan adanya permasalahan yang ditinggalkan juga, sehingga mungkin hal-hal tersebut yang membuat keluarga yang ada di sini itu, di Indonesia berat untuk menerima kepulangannya mereka”* (Wawancara, 7 April 2026). Secara mendalam, hambatan ini berakar pada perbedaan latar belakang dan narasi personal dari setiap individu. Karakteristik personal yang dinilai kurang stabil, lemahnya prinsip hidup, serta tekanan beban ekonomi menjadi faktor pemicu utama migrasi mereka. Keberangkatan yang sering kali meninggalkan persoalan keluarga yang belum terselesaikan inilah yang kemudian menciptakan resistensi dan kesulitan bagi pihak keluarga untuk menerima kembali kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut.

Kondisi ini sering kali memicu resistensi dan stigma negatif dari masyarakat maupun kerabat dekat, terutama ketika Pekerja Migran Indonesia (PMI) dipulangkan melalui jalur deportasi tanpa membawa hasil ekonomi atau justru dianggap menambah beban finansial. Meskipun proses reintegrasi menghadapi hambatan tersebut, UPT P2TK tetap proaktif berkoordinasi dengan Disnakertrans daerah untuk merumuskan solusi terbaik. Secara prosedural, tanggung jawab UPT P2TK dinyatakan selesai apabila pihak keluarga telah menerima kembali PMI di daerah asal dan menyatakan kesediaannya untuk memberikan dukungan sosial.

Efektivitas Strategi Reintegrasi Sosial UPT P2TK Disnakertrans Jatim Dalam Mendorong Penerimaan Sosial dan Produktivitas PMI Deportasi

Sejauh ini, strategi reintegrasi sosial yang dilaksanakan oleh UPT P2TK hanya berfokus pada pemenuhan secara penugasan resmi yang telah diberikan oleh Disnakertrans, yaitu menyelenggarakan pelatihan kerja atau pembekalan keterampilan. Untuk memastikan bahwa program pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kuota dan target yang telah ditetapkan adalah menjadi fokus utama instansi. Hal ini menunjukkan bahwa, dari segi output strategi telah berjalan, tetapi karena adanya beberapa hambatan, keberlanjutan hasil dari pelatihan belum menjadi prioritas utama.

Salah satu indikator utama efektivitas sebuah strategi adalah adanya pengawasan (monitoring) pasca-program. Namun, ditemukan kendala bagi UPT P2TK terkait anggaran untuk melakukan pemantauan terhadap PMI yang telah mengikuti pelatihan tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh narasumber, ” *sebenarnya gini ya semua itu kan terkait dengan biaya terkait dengan anggaran. Kalau memang kami ada anggaran untuk melakukan monitoring terkait dengan kegiatan setelah adanya PMI Purna, baru kita bisa melakukan monitoring ke PMI. Misalnya besok ini ada 50 orang dari hasil belajar ini bisa gak kamu golah Itu nanti, kita akan melakukan monitoring bulan depan ke PMI tersebut tapi secara acak. Berhasil gak kamu? Nah selama ini kami belum pernah melakukan itu karena tidak ada anggaran untuk dilakukan monitoringnya. Sebenarnya kami pengen juga tapi ke depannya belum bisa memastikan, hanya berhenti sampai di situ saja yang penting kan kita sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas penugasan*” (Wawancara, 6 April 2026).

Kesehatan bagi para PMI merupakan hal yang sangat penting setelah mereka mengalami deportasi. Hal ini penting untuk keberhasilan berbagai program kebijakan perlindungan sosial, termasuk dukungan dan konselor psikologis, pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, dan program reintegrasi sosial. Kecukupan bagi pekerja migran Indonesia yang dideportasi adalah memberikan akses dan dukungan yang memadai agar mereka dapat mengatasi dampak negatif dari migrasi dan mendapatkan kesempatan baru untuk memulainya (Septianda, 2023).

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan krusial dalam mengukur efektivitas program reintegrasi sosial. Berdasarkan keterangan narasumber, kendala finansial menyebabkan proses pemantauan pasca pelatihan keterampilan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, evaluasi dampak pelatihan terhadap peningkatan ekonomi para PMI menjadi tidak optimal karena tidak semua peserta mendapatkan pendampingan lanjutan, sebagaimana pernyataan “*Jadi kami pernah melakukan monitoring, itu ada yang pernah sampai buka usaha. Pernah ada, tapi itu di tahun-tahun lalu. Karena*

untuk kegiatan terakhir tahun 2024 sampai yang nanti akan disembahkan, itu masih belum ada monitoringnya” (Wawancara, 7 April 2026). Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya data lapangan yang menunjukkan kejelasan dari monitoring tersebut, efektivitas strategi reintegrasi untuk meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang masih bersifat spekulatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur telah mengimplementasikan strategi reintegrasi sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna deportasi dari Malaysia melalui berbagai program pelatihan keterampilan dan stabilisasi di *shelter*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan proses reintegrasi ini sangat determinan pada aspek dukungan lingkungan sosial dan aksesibilitas keluarga. Dukungan tersebut menjadi instrumen krusial dalam memitigasi stigma negatif sebagai "kegagalan ekonomi" yang kerap melekat pada PMI yang dideportasi. Meskipun mekanisme secara administratif dan teknis telah berjalan, efektivitas program masih terhambat oleh keterbatasan anggaran yang menyebabkan pengawasan pasca program tidak dapat dilakukan secara konsisten. Selain itu, upaya mewujudkan kemandirian ekonomi juga menghadapi kendala teknis berupa ketidaksesuaian data alamat domisili PMI di lapangan. Secara esensial, keberhasilan reintegrasi tidak dapat dicapai secara optimal apabila hanya mengandalkan intervensi kelembagaan tanpa adanya sinergi yang kuat dengan masyarakat lokal serta dukungan finansial yang berkelanjutan untuk pendampingan jangka panjang.

Disarankan agar pemerintah, melalui Disnakertrans Jawa Timur, mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan agar alumni program pemberdayaan dapat mandiri secara ekonomi dan tidak kembali ke jalur migrasi non-prosedural. Diperlukan juga peningkatan kerja sama dengan perangkat desa untuk memastikan data PMI tetap akurat dan memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengurangi stigma negative terhadap PMI deportasi.

DAFTAR REFERENSI

- Annafiurrahman. (2025). ANALISIS HUMAN SECURITY : PERAN KOLABORASI UPT P2TK DISNAKERTRANS JAWA TIMUR DENGAN KEMENTERIAN LUAR. *JaIM : Jurnal Abdimas Imigrasi*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.52617/jaim.v6i1.718>
- Aprilliana, D., & Gunawan, F. (2025). EFFECTIVENESS OF FACILITATION SERVICES FOR REPATRIATION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS AT TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LABOR AND TRANSMIGRATION OFFICE IN EAST JAVA PROVINCE. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(1), 282–290. <http://jurnaldialektika.com/>

- Black, R., & Gent, S. (2006). *Sustainable Return in Post-conflict Contexts* (Vol. 44, Issue 3).
- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labor in Society*. https://books.google.co.id/books?id=B955X3C-9E8C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
- Fidyawati, E., & Ardi, M. (2024). Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tulungagung Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 1140–1155. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11652513>
- Fitria, T. A., Gunade, D. T., Mariyati, A., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA MELALUI PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II AMUNTAI. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1088–1097. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1180>
- Hakim, M. F., & Si, M. (2025). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA OLEH UPT P2TK JAWA TIMUR DALAM REPATRIASI JENAZAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL DI MALAYSIA HUMAN RIGHTS PROTECTION BY THE EAST JAVA UPT P2TK IN THE REPATRIATION OF REMAINS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS UNDER NON-PRO. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 8(2), 63–75.
- Janker, J., & Thieme, S. (2021). Migration and justice in the era of sustainable development goals: a conceptual framework. *Sustainability Science*, 16(5), 1423–1437. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-00958-3>
- Kemendo. (2025). *Bertemu Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, Menko Muhaimin Tekankan Pemberdayaan Pekerja Migran dan Keluarganya*. 10 Oktober. <https://pemberdayaan.go.id/pages/media/detailmedia/bertemu-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-menko-muhaimin-tekankan-pemberdayaan-pekerja-migran-dan-keluarganya>
- KP2MI. (2026). *Data Penempatan Dan Pelindungan*. 17 APRIL. <https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-juli-2025>
- Maiwan, M. (2016). PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA CATERING MAKANAN BAGI PURNA TKI (TENAGA KERJA INDONESIA) DI DESA TONJONG, KECAMATAN BOJONGGEDE, KABUPATEN BOGOR, PROPINSI JAWA BARAT. *Jurnal Sarwahita*, 13(2), 96–102. <https://doi.org/10.21009/sarwahita>
- Publication, I. (n.d.). *Reintegration handbook*.
- Pujiati Sri, D. (2025). Membangun Kehidupan Pasca Migrasi: Sebuah Kajian Tentang Ketahanan Keluarga dan Modal Sosial dalam Proses Strukturasi Sosial Purna Pekerja Migran di Desa Sende. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 10(1), 9–12. <https://journals.unpad.ac.id/sosio/global/article/download/67431/pdf>
- Septianda, F. M. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG DIDEPORTASI DARI MALAYSIA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung*, 3(2), 23–24. <https://journal.uml.ac.id/DMKR/article/view/2076/736>
- Siswanto Dimas Gerald, Pramesti Anggita, Shofil Charis Muhammad, S. I. R. (2025). PERAN UPT P2TK PROVINSI JAWA TIMUR DALAM IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DAN PELAYANAN PADA PEKERJA MIGRAN. *Jaid*, 5(18), 63–75. <https://doi.org/https://10.0.205.137/jaid.v5i2.768>